

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan disajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Tinjauan pustaka yang disajikan terdiri dari teori-teori yang menggambarkan konsep dari variabel yang diteliti serta penelitian terdahulu yang menjadi acuan atau perbandingan untuk melakukan penelitian. Penulisan dilanjutkan dengan membahas kerangka pemikiran teoritis yang menjelaskan model serta hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Setelah itu, diikuti dengan hipotesis atau dugaan sementara penelitian yang diajukan.

##### **2.1.1 Pembangunan Ekonomi**

Arsyad (2010) mengungkapkan bahwa definisi dari pembangunan ekonomi yaitu suatu proses yang menyebabkan naiknya pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Unsur-unsur pokok dari definisi pembangunan ekonomi tersebut yaitu:

- a. Proses, artinya pembangunan merupakan suatu proses atau perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Maka dari itu masyarakat harus menjalani proses atau tahapan perkembangan agar mendapat kemakmuran dan kesejahteraan;
- b. Peningkatan pendapatan per kapita, artinya pembangunan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita, oleh karena itu peran

pemerintah, masyarakat juga elemen dalam suatu negara untuk berpartisipasi secara aktif dan berkontribusi dalam proses pembangunan;

- c. Peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang, artinya pembangunan terjadi ketika terdapat kecenderungan kenaikan pendapatan per kapita dari waktu ke waktu dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi dapat dilakukan melalui investasi, penggunaan teknologi, pengasahan keterampilan, pengetahuan organisasi, dan peningkatan kemampuan.
- d. Perbaikan sistem kelembagaan, artinya pembangunan harus mencakup perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang baik dari aspek perbaikan di bidang aturan main maupun organisasi yang menerapkan aturan main tersebut.

Pembangunan ekonomi bergantung dari pertumbuhan ekonomi, dimana pembangunan ekonomi didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, karena ekonomi memperlancar dalam proses pembangunan (Djojohadikusumo, 1991 dalam Rapanna dan Sukarno, 2017). Suatu wilayah dapat dikatakan mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi jika terjadi peningkatan PDRB di wilayah tersebut dalam bentuk kenaikan pendapatan (Rapanna dan Sukarno, 2017).

### **2.1.2 Pembangunan Ekonomi Wilayah**

Menurut Arsyad (2010) pembangunan ekonomi wilayah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi wilayah

merupakan suatu proses pengelolaan sumber daya alam yang tersedia dengan tujuan untuk menaikkan pendapatan asli daerah.

Setiap upaya melakukan pembangunan wilayah, tujuan utamanya yaitu untuk mensejahterakan masyarakat pada wilayah tersebut. Pemerintah daerah dan masyarakatnya harus turut andil dalam upaya peningkatan pembangunan wilayah dengan mengambil inisiatif pembangunan wilayah dengan mengelola sumber daya yang tersedia dan mengembangkannya untuk merancang proses pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi wilayah, perlu adanya strategi pengembangan ekonomi wilayah yang baik dan terarah agar mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi sendiri erat kaitannya dengan strategi pembangunan ekonomi. Strategi pembangunan wilayah dapat dibagi menjadi empat kelompok (Arsyad, 1999).

1. Strategi pengembangan fisik atau lokalitas, dilakukan dengan program perbaikan kondisi fisik atau lokalitas daerah untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan. Tujuannya untuk menciptakan identitas wilayah atau kota, memperbaiki basis pesona atau kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki dunia usaha daerah.
2. Strategi pengembangan dunia usaha, merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik, kreasi atau daya perekonomian daerah yang sehat.
3. Strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Salah satunya dapat dilakukan

dengan cara mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan dan keterampilan di suatu daerah yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.

4. Pengembangan ekonomi masyarakat, kegiatan pembangunan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan suatu kelompok masyarakat di suatu daerah atau dikenal dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial, seperti melalui penciptaan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh keuntungan dari usahanya.

### **2.1.3 Ketimpangan Pembangunan**

Ketimpangan pembangunan merupakan ketidakmerataan distribusi pembangunan antar wilayah. Dalam kegiatan ekonomi, ketimpangan pembangunan antar wilayah sangat umum terjadi. Ketimpangan pembangunan antar wilayah pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan kondisi demografi dan perbedaan kandungan sumber daya alam yang terdapat pada tiap wilayah. Perbedaan tingkat pembangunan antar wilayah akan berdampak kepada tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Oleh karena itulah aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah mempunyai keterkaitan terhadap perumusan kebijakan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Arsyad, 2008).

#### **2.1.3.1 Teori Ketimpangan Pembangunan**

Terdapat beberapa teori yang berhubungan dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah, yaitu:

### 1. Teori Neo-Klasik (Douglass C. North)

Menurut Hipotesa Neo-klasik ketimpangan pembangunan wilayah cenderung meningkat pada awal mula proses pembangunan suatu negara. Proses ini akan terus terjadi sampai ketimpangan pembangunan mencapai titik teratas, kemudian ketimpangan pembangunan akan berangsur-angsur menurun apabila proses pembangunan terus berlanjut. Pada hipotesa ini sementara dapat disimpulkan bahwa di negara maju memiliki ketimpangan lebih rendah sementara di negara sedang berkembang umumnya ketimpangan tersebut lebih tinggi antar wilayahnya (Sjafrizal, 2008).

Pada permulaan proses pembangunan di negara maju, daerah-daerah yang kondisi pembangunan yang sudah baik umumnya memanfaatkan kesempatan dan peluang pembangunan yang ada. Sementara daerah-daerah yang masih tertinggal tidak mampu memanfaatkan pembangunan yang ada karena rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sarana dan prasarana. Hambatan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi sosial budaya sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat pada daerah yang kondisinya lebih baik (Syafrizal, 2008).

### 2. Teori Growth Poles (Perroux) dan Growth Center (Boudeville)

Konsep kutub pertumbuhan (*growth poles*) yaitu bahwa kegiatan ekonomi suatu daerah cenderung beraglomerasi di sekitar pusat-pusat pertumbuhan. Perroux mendefinisikan kutub pertumbuhan sebagai wilayah dengan hubungan sosial-ekonomi yang kuat dengan daerah sekitarnya, yang bertindak sebagai pusat pertumbuhan memiliki kemampuan untuk menyebar pembangunan di seluruh

wilayah (Mustatea, 2013 dalam Jumino, 2019). Terdapat ciri suatu wilayah yang termasuk dalam aglomerasi yaitu konsentrasi yang tinggi serta tingkat teknologi dan keahlian yang sudah modern.

Konsep pusat pertumbuhan (*growth center*) ditemukan oleh Boudeville, ia menggunakan konsep kutub pertumbuhan dijadikan konsep keruangan. Pusat pertumbuhan adalah suatu wilayah yang memiliki suatu propulsive industries yang kompleks. Propulsive industries adalah industri yang mempunyai pengaruh besar terhadap kegiatan lainnya (Darnilawati, 2018). Adanya pusat pertumbuhan di suatu wilayah dapat menimbulkan ketimpangan wilayah apabila pusat pertumbuhan tersebut tidak memberikan dampak terhadap wilayah lain disekitarnya. Sehingga proses pertumbuhan dan pembangunan hanya terjadi pada wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan.

### 3. Trickle Down Effect-Polarization (Hirschman)

Hirschman dalam Arsyad (1999) menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi secara geografis tidak seimbang, kondisinya tidak merata ke semua wilayah. Dalam suatu wilayah terdapat beberapa titik pertumbuhan dimana industri berkumpul di suatu wilayah karena penghematan dan kemudahan. Lapangan kerja, investasi, dan upah buruh relatif tinggi yang lebih banyak terdapat pada wilayah yang termasuk pusat pertumbuhan. Antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan terdapat ketergantungan dalam penyediaan barang dan tenaga kerja.

Hirschman pada tahun 1958 percaya bahwa *trickling down* akan mengatasi pengaruh polarisasi. Wilayah pedesaan berspesialisasi pada produksi primer dan wilayah perkotaan berspesialisasi pada industri maka meluasnya permintaan

wilayah kota harus mendorong perkembangan wilayah desa. Saran dari Hirschman untuk membentuk lebih banyak titik pertumbuhan ekonomi agar dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah dan menimbulkan dampak penyebaran yang merata.

### **2.1.3.2 Ukuran Ketimpangan Pembangunan**

Penetapan ukuran ketimpangan pembangunan wilayah merupakan hal yang sulit karena dapat menimbulkan perbedaan pendapat, suatu pihak berpendapat bahwa ketimpangan suatu wilayah cukup tinggi dilihat dari banyaknya kelompok miskin di daerah yang bersangkutan, namun di pihak lain, ada pendapat bahwa ketimpangan suatu wilayah cukup tinggi dilihat dari segelintir kelompok kaya yang berada di tengah tengah masyarakat yang mayoritas masih miskin. Perlu diketahui bahwa berbeda dengan distribusi pendapatan yang melihat ketimpangan antar kelompok masyarakat, sedangkan ketimpangan pembangunan melihat perbedaan antar wilayah (Syafriзал, 2008). Beberapa ukuran ketimpangan pembangunan, antara lain:

#### **1. Indeks Williamson**

Salah satu penghitungan untuk mengetahui tingkat ketimpangan antar wilayah menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yaitu dengan menggunakan indeks ketimpangan Williamson. Indeks Williamson merupakan salah satu model yang dikemukakan oleh Jeffrey G. Williamson pada tahun 1966 untuk mengukur ketimpangan antar wilayah (Syafriзал, 2008). Perhitungan indeks Williamson menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar dan jumlah penduduk sebagai data dasar. Formulasi Indeks Williamson adalah sebagai berikut:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum (y_i - y)^2 f_i / n}}{y}$$

Dimana:

$V_w$  = Indeks Williamson

$y_i$  = PDRB per kapita tiap wilayah pada provinsi di Pulau Jawa

$y$  = PDRB per kapita rata-rata tiap provinsi di Pulau Jawa

$f_i$  = Jumlah penduduk tiap wilayah pada provinsi di Pulau Jawa

$n$  = Jumlah penduduk tiap provinsi di Pulau Jawa

Indeks Williamson memiliki nilai 0 (nol) sampai dengan 1 (satu), apabila wilayah dengan indeks Williamson mendekati angka nol maka ketimpangan di wilayah tersebut rendah atau merata. Begitu pula sebaliknya, apabila wilayah dengan indeks Williamson mendekati angka satu maka ketimpangan di wilayah tersebut tinggi.

## 2. Indeks Entropi Theil

Indeks Entropi Theil adalah statistik yang digunakan untuk mengukur salah satunya ketimpangan ekonomi. Konsep Entropi Theil dari suatu distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Data yang diperlukan dalam analisis Indeks Entropi Theil adalah produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita dan jumlah penduduk untuk setiap wilayah (Sjafrizal, 2008). Formulasi *Theil Index* ( $T_d$ ) adalah sebagai berikut:

$$T_d = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left\{ \frac{y_{ij}}{Y} \right\} \log \left[ \frac{y_{ij}/Y}{n_{ij}/N} \right]$$

Dimana:

$T_d$  = Indeks Entropi Theil

$y_{ij}$  = PDRB per kapita tiap wilayah pada provinsi di Pulau Jawa

$Y$  = PDRB per kapita tiap provinsi di Pulau Jawa

$n$  = Jumlah penduduk tiap wilayah pada provinsi di Pulau Jawa

$N$  = Jumlah penduduk tiap provinsi di Pulau Jawa

Sama seperti Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil berkisar  $0 < IET < 1$ , apabila nilai Indeks Entropi Theil mendekati angka 1 maka di wilayah tersebut terjadi ketimpangan yang semakin tinggi dan apabila Indeks Entropi Theil mendekati 0 maka ketimpangan semakin rendah atau semakin merata. Indeks Entropi Theil dapat menyediakan pengukuran ketimpangan dalam sub sektor selama periode tertentu.

### 3. PDRB Per Kapita Relatif (Indeks Bonet)

Ketimpangan diukur menggunakan proksi yang dipakai dalam penelitian Jaime Bonet (2006) yang mendasarkan ukuran ketimpangan wilayah pada konsep PDRB per kapita relatif dengan rumus:

$$I_{i,t} = \frac{PDRB_{PCi,t}}{PDB_{PC I,t}} - 1$$

Dimana:

$I_{i,t}$  = Ketimpangan wilayah Provinsi  $i$ , pada tahun  $t$

$PDRB_{PCi,t}$  = PDRB per kapita Provinsi  $i$ , pada tahun  $t$

$PDB_{PC I,t}$  = PDB per kapita nasional pada tahun  $t$

Rumus tersebut menyatakan bahwa kesetaraan sempurna terjadi pada saat PDRB perkapita wilayah sama dengan PDB nasional. Oleh karena itu, ketimpangan

wilayah diukur dari selisih antara PDRB per kapita relatif (wilayah terhadap nasional) dan 1 (kondisi kesetaraan sempurna) yang diabsolutkan.

### **2.1.3.3 Faktor-faktor Penyebab Ketimpangan Pembangunan**

Menurut Sjafrizal (2008) beberapa faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan antar wilayah yaitu:

#### **a. Perbedaan Kandungan Sumber Daya Alam**

Wilayah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup banyak akan dapat memproduksi barang dan jasa tertentu dengan biaya yang relatif murah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah bersangkutan menjadi lebih cepat. Wilayah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan wilayah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Dengan demikian terlihat bahwa perbedaan kandungan sumber daya alam akan mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah.

#### **b. Perbedaan Kondisi Demografis**

Kondisi demografis yang dimaksud adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis ini akan dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan.

Wilayah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Sebaliknya, bila pada suatu wilayah tertentu kondisi demografisnya buruk maka hal ini akan menyebabkan rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat yang menimbulkan kondisi yang kurang menarik bagi investasi sehingga pertumbuhan ekonomi tersebut akan menjadi lebih rendah.

c. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa

Mobilitas barang dan jasa mencakup kegiatan perdagangan antar wilayah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah apabila mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat di jual ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi, sehingga wilayah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

d. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat dalam suatu wilayah dimana konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan wilayah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan taraf pendapatan masyarakat.

e. Alokasi Dana Pembangunan antar Wilayah

Alokasi investasi pemerintah ke suatu daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang

dianut bersifat sentralistik maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Jika sebaliknya dimana sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung rendah. Alokasi dana pemerintah yang antara lain akan memberikan dampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah alokasi dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, dan listrik. Semua sektor ini akan memberikan dampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan perkapita, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di daerah tersebut.

#### **2.1.3.4 Penanggulangan Ketimpangan Pembangunan**

Sjafrizal (2008) menyatakan bahwa terdapat kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan ketimpangan pembangunan antar wilayah, yaitu:

##### **a. Penyebaran Pembangunan Prasarana Perhubungan**

Kebijakan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan yaitu dengan memperlancar mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah. Upaya tersebut dapat dilaksanakan melalui penyebaran pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan ke seluruh pelosok wilayah. Prasarana perhubungan yang dimaksudkan yaitu seperti fasilitas jalan guna membantu proses perdagangan antar wilayah selain itu sarana telekomunikasi sebagai alat komunikasi dengan daerah lainnya.

b. Mendorong Transmigrasi dan Migrasi Spontan

Transmigrasi adalah pemindahan penduduk ke daerah kurang berkembang dengan dukungan fasilitas dan dukungan pemerintah, sedangkan migrasi spontan yaitu perpindahan penduduk yang dilakukan secara sukarela menggunakan biaya sendiri. Melalui proses migrasi spontan dan transmigrasi kekurangan tenaga kerja atau rendahnya sumber daya manusia yang dialami wilayah terbelakang akan dapat teratasi sehingga proses pembangunan antar wilayah dapat terlaksana dengan baik.

c. Pengembangan Pusat Pertumbuhan (*Growth Poles*)

Penerapan konsep ini yaitu untuk mendorong proses pembangunan wilayah sekaligus untuk meminimalkan ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan pada kota berskala kecil dan menengah akan berkembang sehingga kegiatan pembangunan dapat lebih disebarkan ke daerah pelosok.

d. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dilaksanakannya desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah kegiatan pembangunan daerah akan tergerak karena ada wewenang oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan tersebut maka aspirasi dan inisiatif masyarakat untuk mengembangkan potensi daerah akan tergerak. Bila hal ini dapat dilakukan maka proses pembangunan wilayah akan lebih ditingkatkan dan secara bersamaan akan mengurangi ketertinggalan atau ketimpangan pembangunan antar wilayah.

#### **2.1.4 Aglomerasi**

Kuncoro (2019) mendefinisikan aglomerasi sebagai konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi dan penduduk di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan, diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen untuk meminimalisasi biaya-biaya seperti biaya transportasi, informasi, dan komunikasi. Aglomerasi pada suatu wilayah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar wilayah sehingga perkembangan ekonomi di wilayah tersebut akan mempengaruhi perkembangan wilayah lainnya.

Menurut Sjafrizal (2008) Pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu yang didorong oleh adanya keuntungan aglomerasi yang timbul karena adanya konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut. Munculnya beberapa konsentrasi kegiatan ekonomi ini selanjutnya mendorong pula pada peningkatan efisiensi kegiatan positif bahkan negatif bagi pembangunan ekonomi nasional atau wilayah.

Dampak positif aglomerasi yaitu memperoleh manfaat dari memiliki kegiatan ekonomi sebanyak mungkin dalam jarak berdekatan, menghemat biaya transportasi dan menghemat biaya iklan di suatu wilayah pusat aglomerasi. Sementara dampak negatif dari aglomerasi yang hanya terjadi di suatu wilayah akan menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

##### **2.1.4.1 Ukuran Aglomerasi**

Adapun pengukuran aglomerasi sebagai berikut dengan beberapa cara (Mauleny, 2015) yaitu:

1. Menggunakan proporsi jumlah penduduk perkotaan dalam suatu provinsi terhadap jumlah penduduk wilayah tersebut.
2. Menggunakan konsep aglomerasi produksi yang diukur menggunakan proporsi sub-daerah/ wilayah terhadap PDRB daerah tersebut.
3. Menggunakan konsep proporsi jumlah tenaga kerja sektor industri di kabupaten/kota terhadap jumlah tenaga kerja sektor industri dalam suatu provinsi.

Penelitian ini menggunakan perhitungan konsep aglomerasi produksi yaitu menggunakan proporsi PDRB provinsi terhadap PDB nasional, dengan rumus sebagaimana yang digunakan dalam penelitian Bonet (2006) dan Yusica (2016) dalam studinya yang meneliti tentang pengaruh aglomerasi terhadap ketimpangan pembangunan. Berikut rumusnya:

$$Ag = \frac{PDRB_{ji}}{PDRB_{toti}}$$

Dimana:

Ag = Aglomerasi produksi

PDRBi = PDRB ADHK provinsi di Pulau Jawa

PDRBtoti = PDRB ADHK total provinsi

#### **2.1.4.2 Faktor-faktor Penentu Aglomerasi**

Kegiatan ekonomi cenderung berpusat pada wilayah-wilayah yang potensial. Perkotaan memiliki daya tarik dalam menawarkan kelebihan dalam bentuk pendapatan dan produktivitas yang tinggi, teknologi canggih, mampu menarik investasi, pekerja terdidik, dan terampil dalam jumlah yang tinggi

dibanding pedesaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi aglomerasi (Tarigan 2005, dalam Tilaar, 2010):

### 1. Pendapatan Per Kapita

Pada hipotesis Krugman (1991) menyebutkan lokasi dengan penduduk yang padat akan menarik konsentrasi produksi manufaktur. Pada wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi akan mempengaruhi permintaan dan meningkatkan penawaran terhadap barang konsumtif sehingga mendorong industri-industri baru untuk mencukupi pasar.

### 2. Input Lokal

Input lokal yaitu perlengkapan, bahan baku, atau layanan yang terdapat di lokasi yang layak dan tidak bisa didatangkan dari wilayah lain seperti aspek geografi dan pelayanan publik lokal. Fitur umum dari input lokal adalah bahwa apapun yang menawarkan perlengkapan di lokasi tertentu tergantung pada kondisi di lingkungan itu sendiri dan tidak melibatkan transfer dari luar.

### 3. Biaya Tenaga Kerja

Faktor pasar tenaga kerja, khususnya tingkat upah dan keterampilan tenaga kerja akan mendorong terjadinya aglomerasi, karena dengan pemusatan kegiatan perekonomian akan terjadi urbanisasi tenaga kerja yang diakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya upah pekerja di daerah terbelakang. Hal itu disebabkan karena daerah perkotaan yang berindustri padat memberi upah lebih layak karena peraturan.

### **2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia**

Indikator untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia yaitu indeks pembangunan manusia. United Nations Development Programme (UNDP) membangun indeks pembangunan manusia beserta sumber daya yang dimilikinya pada tahun 1990. Pengukuran kemajuan manusia dilakukan melalui pendekatan tiga dimensi mencakup dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi standar hidup layak.

Seiring dengan melakukan perubahan metodologi yang dilakukan oleh United Nations Development Programme (UNDP) sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 2015 Indonesia turut mengadopsi indeks pembangunan manusia metode baru. Metodologi indeks pembangunan manusia mengalami perubahan, karena beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan indeks pembangunan manusia. Dalam mengukur pendidikan secara utuh angka melek huruf sudah tidak relevan karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan, kemudian angka melek huruf diubah menjadi angka harapan sekolah. Produk domestik bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah, kemudian PDB diganti oleh produk nasional bruto (PNB) per kapita.

Metode penghitungan penggunaan rumus rata-rata aritmatik pada penghitungan indeks pembangunan manusia menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Kemudian metode penghitungan rata-rata aritmatik diubah menjadi rata-rata geometrik. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam penyusunan indeks

pembangunan manusia berarti capaian suatu dimensi tidak dapat ditutupi oleh dimensi lain. Maksudnya ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya dalam mewujudkan pembangunan manusia.

Indeks pembangunan manusia merupakan indeks yang mengukur capaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara, yang mengkombinasikan mengkombinasikan tiga dimensi dasar, yaitu hidup sehat dan umur panjang, pengetahuan dan standar hidup layak. Dimensi tiga dasar menurut metode baru tersebut, diwakili oleh beberapa indikator diantaranya:

1. Hidup sehat dan umur panjang diwakili oleh indikator angka harapan hidup (AHH) pada saat lahir. Angka harapan hidup merupakan rata-rata dari perkiraan banyak tahun yang ditempuh oleh seseorang pada saat lahir. Semakin baik kesehatan seorang individu maka kecenderungan untuk bertahan hidup semakin tinggi.
2. Pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang, sehingga harapan lama sekolah (HLS) menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam perluasan kesempatan pendidikan di suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani.
3. Dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari

nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity/PPP*). Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang diterima oleh penduduk sebagai dampak membaiknya ekonomi.

### 2.1.5.1 Ukuran Indeks Pembangunan Manusia

Angka IPM diperoleh dengan melakukan dua tahapan, yaitu:

1. Melakukan penghitungan indeks untuk komponen pembentuk IPM, yaitu indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Untuk setiap komponen dihitung dengan cara membandingkan nilai masing-masing dengan standar maksimum minimum yang sudah ditetapkan.

**Tabel 2.1 Nilai Minimum dan Maksimum Komponen IPM Metode Baru**

| <b>Komponen IPM</b>                       | <b>Minimum</b> | <b>Maksimum</b> | <b>Keterangan</b> |
|---|----------------|-----------------|-------------------|
| Angka Harapan Hidup (AHH)                 | 20             | 85              | Standar UNDP      |
| Harapan Lama Sekolah (HLS)                | 0              | 18              | Standar UNDP      |
| Rata-rata Lama Sekolah (RLS)              | 0              | 15              | Standar UNDP      |
| Pengeluaran Perkapita Setahun disesuaikan | 1.007.436      | 26.572.252      | Standar UNDP      |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berikut rumus tiap dimensi dari IPM:

Dimensi Kesehatan:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Dimensi Pendidikan:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Dimensi Pengeluaran:

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

2. Menghitung angka indeks pembangunan manusia dengan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Keterangan:

IPM = Indeks pembangunan manusia

I Kesehatan = Umur harapan hidup (UHH)

I Pendidikan = Harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS)

I Pengeluaran = Pengeluaran per kapita setahun disesuaikan

Badan Pusat Statistik mengelompokan indeks pembangunan manusia ke dalam empat kategori untuk melihat pencapaian indeks pembangunan manusia antar wilayah. Kategori tersebut dijelaskan pada tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.2 Kategori Status Pembangunan Manusia**

| <b>Nilai Indeks Pembangunan Manusia</b> | <b>Status</b> |
|---|---------------|
| $< 60$                                  | Rendah        |
| $60 \leq \text{IPM} < 70$               | Sedang        |
| $70 \leq \text{IPM} < 80$               | Tinggi        |
| $\geq 80$                               | Sangat Tinggi |

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat tiga manfaat dari indeks pembangunan manusia yaitu:

1. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat).
2. Indeks pembangunan manusia digunakan dalam menentukan peringkat pembangunan suatu wilayah bahkan negara.
3. Indeks pembangunan manusia bagi Indonesia merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, indeks pembangunan manusia pula digunakan sebagai salah satu alokatur penentuan dana alokasi umum (DAU).

#### **2.1.5.2 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut Badan Pusat Statistik, terdapat tiga manfaat dari indeks pembangunan manusia, di antaranya:

1. Indeks pembangunan manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat).
2. Indeks pembangunan manusia digunakan dalam menentukan peringkat pembangunan suatu wilayah bahkan negara.

3. Indeks pembangunan manusia bagi Indonesia merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, indeks pembangunan manusia pula digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum (DAU).

### **2.1.6 Tingkat Pengangguran**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Sementara, tingkat pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan.

Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah sosial ekonomi kepada yang mengalaminya. Ketiadaan pendapatan akan mengakibatkan para penganggur harus mengurangi tingkat konsumsinya. Sehingga akan mengganggu taraf kesehatan keluarga. Pengangguran yang berkepanjangan akan memberikan efek buruk terhadap psikologis atas penganggur dan keluarganya.

Dalam ilmu kependudukan, orang yang mencari kerja masuk dalam penduduk yang disebut angkatan kerja. Berdasarkan kategori usia, usia angkatan kerja adalah 15-64 tahun. Namun, tidak semua penduduk yang berusia 15-64 tahun dihitung sebagai angkatan kerja. Kelompok yang dihitung sebagai angkatan kerja adalah penduduk berusia 15-64 tahun yang bekerja dan sedang mencari kerja.

#### **2.1.6.1 Ukuran Tingkat Pengangguran**

Untuk mengetahui besar kecilnya tingkat pengangguran dapat diamati dari pendekatan tenaga kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran dihitung

berdasarkan persentase dari jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. menurut Sukirno (2017) dapat diukur dengan cara :

$$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$$

Dimana:

TPT = Tingkat pengangguran terbuka

PP = Jumlah pengangguran

PAK = Jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja usia 15 tahun ke atas)

### **2.1.6.2 Jenis-jenis Pengangguran**

Sukirno (2017) menjelaskan bahwa pengangguran dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

#### **1. Jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya**

Berdasarkan penyebabnya, pengangguran dibedakan menjadi empat jenis, sebagai berikut:

##### **a. Pengangguran Friksional atau Normal**

Pengangguran friksional merupakan pengangguran yang terjadi karena seseorang sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik, contohnya seperti meninggalkan tempat kerja lama dan mencari tempat kerja baru yang gajinya lebih besar. Dalam proses mencari pekerjaan inilah seseorang tergolong sebagai pengangguran friksional.

##### **b. Pengangguran Struktural**

Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang terjadi karena adanya masalah dalam struktur ekonomi. Misalnya, seorang pekerja tidak mampu menyesuaikan keterampilan-keterampilan baru dalam melakukan pekerjaan ke

arah modern karena ada perubahan struktur ekonomi sehingga perusahaan terpaksa memberhentikan pekerja tersebut.

c. Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal merupakan pengangguran yang terjadi karena siklus naik turun perekonomian. Turunnya perekonomian akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga perusahaan akan menurunkan proses produksi kemudian perusahaan akan mengurangi pekerjanya.

d. Pengangguran Teknologi

Pengangguran yang terjadi akibat tenaga kerja manusia digantikan oleh mesin atau robot karena lebih mudah, hemat biaya, dan cepat. Contohnya, penggunaan mesin E-toll telah mengurangi penggunaan tenaga kerja manusia sebagai jasa untuk transaksi pembayaran penggunaan jalan tol.

2. Pengangguran Berdasarkan Cirinya

Berdasarkan cirinya, pengangguran dibedakan menjadi empat jenis, sebagai berikut:

a. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka merupakan penganggur atau tenaga kerja yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran jenis ini bisa dibilang cukup banyak karena memang belum memperoleh pekerjaan, walaupun telah berusaha mencari pekerjaan secara maksimal.

b. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran tersembunyi merupakan tenaga kerja yang bekerja tidak secara optimal, hal ini dikarenakan perusahaan memiliki pekerja yang banyak sehingga para pekerja melakukan pekerjaan sedikit atau tidak efisien.

c. Setengah Menganggur

Setengah menganggur atau *underemployed* merupakan tenaga kerja yang bekerja tidak secara optimal karena lapangan pekerjaan yang tidak tersedia. Biasanya pekerja hanya bekerja dua kali dalam seminggu.

d. Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman merupakan pengangguran yang biasanya terjadi pada sektor pertanian dan perikanan yang hanya bekerja pada musim-musim tertentu. Misalnya pada musim hujan nelayan dan petani karet tidak bisa melakukan pekerjaan dan terpaksa menganggur.

### **2.1.6.3 Upaya untuk Mencegah Pengangguran**

Pengangguran sebagai salah satu permasalahan ketenagakerjaan sangat perlu untuk segera diatasi agar tidak menimbulkan masalah baru. Untuk itu diperlukan upaya yang cepat dalam mengatasi pengangguran. Menurut Suroto (1992) upaya untuk mengatasi atau mengurangi pengangguran antara lain:

1. Diperlukannya upaya untuk memperlancar pemberian informasi mengenai lapangan pekerjaan kepada pencari kerja.
2. Pemberian berbagai bantuan kepada pencari kerja untuk mendatangi lapangan kerja yang ada di tempat lain.
3. Pemberian kesempatan kerja sementara sementara selama sepi pekerjaan.

4. Pemberian latihan kerja guna mengasah keterampilan bagi tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan.
5. Diberikan pelatihan pengetahuan baru mengenai teknologi baru agar tenaga kerja tidak mengalami gagap teknologi.
6. Pelaksanaan pembangunan yang secara nyata dan memadai ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja produktif.

Dari uraian di atas diharapkan pengangguran akan semakin menurun. Sehingga masyarakat bisa kembali bekerja untuk menghidupi keluarga dan dirinya. Tersedianya lapangan pekerjaan merupakan salah satu cara untuk mengurangi pengangguran khususnya berkaitan dengan upaya memperlancar pemberian informasi lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja.

#### **2.1.7 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis sehingga menjadi acuan dalam penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

| No. | Penulis dan Judul  | Persamaan Variabel                   | Perbedaan Variabel  | Hasil Penelitian   |
|-----|--|--------------------------------------|---|--|
| (1) | (2)  | (3)                                  | (4)   | (5)  |
| 1.  | Wanti Oktaviani, et al, 2020.<br><i>Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Jambi</i> | Dependen:<br>Ketimpangan pembangunan | Independen:<br>-Dana alokasi umum (DAU)<br>-Dana alokasi khusus (DAK)<br>-Dana bagi hasil (DBH) | Rata-rata nilai Indeks Williamson di Provinsi Jambi selama periode 2001-2016 adalah 0,39. Menggunakan model regresi berganda, jenis data yang digunakan adalah data runtut waktu ( <i>time series</i> ) Secara simultan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan. Secara bersama-sama dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil mampu menjelaskan ketimpangan sebesar 80,00%, sedangkan sisanya sebesar 20,00% dijelaskan variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Secara parsial variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan adalah dana bagi hasil, sedangkan dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan. |
| 2   | Rini Rahartini, et al, 2015.<br><i>Model Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Indonesia</i>                            | Dependen:<br>Ketimpangan pembangunan | Independen:<br>-Pertumbuhan ekonomi<br>-Tingkat kemiskinan<br>-Jumlah penduduk                  | Penelitian menggunakan model regresi berganda. Hasil menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan di Indonesia tahun 2005-2019 tergolong tinggi dan meningkat. Pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Implikasi kebijakan yang dilakukan seharusnya pemerintah perlu memperhatikan sektor yang menyerap tenaga kerja sebagai kontribusi pada tingkat pertumbuhan ekonomi.  |

| (1) | (2)   | (3)  | (4)  | (5)  |
|-----|---|--|--|--|
| 3.  | <p>Rama Nurhuda, M.R Khairul.M dan Wima Y.P, 2013.</p> <p><i>Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011)</i></p>              | <p>Independen: Indeks pembangunan manusia</p> <p>Dependen: Ketimpangan pembangunan</p>         | <p>Independen: - PDRB<br/>-Pendapatan asli daerah (PAD)<br/>-Dana alokasi umum (DAU)</p> | <p>Analisis yang digunakan adalah Indeks Williamson dan regresi linier berganda. Menghasilkan nilai yang tergolong rendah dikarenakan nilai Indeks Williamson mendekati angka 0. PAD dan IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011, sedangkan PDRB dan DAU tidak diketahui karena tidak lolos uji asumsi Klasik. Untuk uji determinan sebesar 96,6% ketimpangan pembangunan di provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011 dapat dijelaskan oleh variabel IPM dan PAD.</p> |
| 4   | <p>Puti Andiny dan Pipit Mandasari, 2017.</p> <p><i>Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan di Provinsi Aceh</i></p>                     | <p>Dependen: Ketimpangan pembangunan</p>   | <p>Independen: -Pertumbuhan ekonomi<br/>-Kemiskinan</p>                                  | <p>Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode analisis regresi berganda, menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel kemiskinan secara parsial tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Aceh. Hasil uji simultan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan. Dan hasil R2 menunjukkan variabel ketimpangan sebesar 2,0%.</p>  |
| 5.  | <p>Hendry Alfiansyah dan Budyanra, 2019.</p> <p><i>Analisis Ketimpangan Pembangunan antar kabupaten/ kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017</i></p> | <p>Independen: Tingkat pengangguran terbuka (TPT)</p> <p>Dependen: Ketimpangan pembangunan</p> | <p>Independen: -Angka melek huruf (AMH)<br/>- Dana alokasi umum (DAU)</p>                | <p>Analisis data panel menunjukkan angka melek huruf dan dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan antar daerah, sedangkan pendapatan asli daerah, belanja modal dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten/ kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>   |

| (1) | (2)  | (3)   | (4)  | (5)  |
|-----|--|---|--|--|
| 6.  | <p>Liling Vera Yusica, et al, 2018.</p> <p><i>Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan antar Wilayah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur</i></p> | <p>Independen:<br/>-Aglomerasi<br/>-Tingkat pengangguran</p> <p>Dependen:<br/>Ketimpangan pembangunan</p> | <p>Independen:<br/>Pertumbuhan ekonomi</p>                                       | <p>Berdasarkan hasil analisis PDRB perkapita, tingkat ketimpangan di wilayah Kalimantan Timur masih menunjukkan ketimpangan wilayah yang lemah karena rata-rata masih menunjukkan angka negatif. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah serta variabel aglomerasi dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah.</p> |
| 7.  | <p>Ketut Wahyu Dhyatmika dan Hastarini Dwi Atmanti, 2013.</p> <p><i>Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran</i></p>   | <p>Independen:<br/>Tingkat pengangguran</p> <p>Dependen:<br/>Ketimpangan pembangunan</p>                  | <p>Independen:<br/>- Penanaman modal asing (PMA)<br/>-Pengeluaran pemerintah</p> | <p>Berdasarkan Tipologi Klassen, Kota tangerang dan Cilegon berada pada kelompok daerah maju dan cepat berkembang, dan daerah lainnya termasuk daerah tertinggal. Hasil data panel dengan metode <i>Fixed Effect Model</i> menunjukkan bahwa PMA berpengaruh positif, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif, sedangkan tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten pasca pemekaran wilayah.</p>      |

| (1) | (2)   | (3)   | (4)   | (5)   |
|-----|---|---|---|---|
| 8   | Agung Aryanto dan Tri Widodo, 2017.<br><i>Analisis Ketimpangan Regional antar Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2013.</i>                                 | Independen:<br>-Indeks pembangunan manusia<br>-Tingkat pengangguran<br><br>Dependen:<br>Ketimpangan pembangunan       | Independen:<br>-Pertumbuhan ekonomi<br>-Inflasi<br>-Tingkat kemiskinan                              | Pengukuran ketimpangan menggunakan indeks Williamson, angka ketimpangan di Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah selama 2004-2013 mengalami tren fluktuasi. Penelitian menggunakan metode analisis regresi data panel, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan, IPM, dan inflasi berpengaruh positif signifikan, serta tingkat kemiskinan dan pengangguran berpengaruh negatif tidak signifikan.  |
| 9.  | Riska Ayu Pramono dan Eny Sulistyaningrum, 2016.<br><i>Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi Riau.</i>                                 | Independen:<br>-Indeks pembangunan manusia (IPM)<br>-Tingkat Pengangguran<br><br>Dependen:<br>Ketimpangan pembangunan | Independen:<br>-Pertumbuhan ekonomi<br>-Investasi Swasta<br>-Distribusi PDRB<br>-Tingkat Kemiskinan | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Jaime Bonet antar kabupaten/ kota di Provinsi Riau selama periode 2005-2013 rata-rata per tahunnya sebesar 0,54 persen. Pada hasil penelitian regresi data panel menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan distribusi PDRB berpengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan wilayah, IPM dan tingkat kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan wilayah, dan tingkat pengangguran tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah. |
| 10  | Muhammad Fajri, Arman Delis, dan Y.V. Amzar, 2017.<br><i>Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera.</i> | Dependen:<br>Ketimpangan pembangunan  | Independen:<br>-Otonomi fiskal<br>-Pertumbuhan ekonomi<br>-Keterbukaan daerah                       | Menggunakan regresi data panel, pengaruh otonomi fiskal terhadap ketimpangan wilayah di Sumatera berpengaruh negatif dan signifikan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan wilayah, sedangkan keterbukaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah.   |

| (1) | (2)  | (3)   | (4)  | (5)   |
|-----|--|---|--|---|
| 11. | Khoir Akfina Didia, 2016.<br><i>Analisis Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Kedungsepur.</i>   | Independen:<br>Indeks pembangunan manusia<br><br>Dependen:<br>Ketimpangan pembangunan | Independen:<br>-Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)<br>-Jumlah Penduduk  | Dengan menggunakan analisis linier berganda dengan metode Ordinary Least Square. Hasil penelitian ini diketahui bahwa secara parsial, semua variabel bebas berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Kawasan Kedungsepur. Secara parsial investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pembangunan, indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan.   |
| 12. | Rosita Juliana dan Aris Soelistyo, 2019.<br><i>Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, PAD, IPM, dan UMK Terhadap Ketimpangan di Provinsi Banten</i> | Independen:<br>Indeks pembangunan manusia<br><br>Dependen:<br>Ketimpangan pembangunan | Independen:<br>-Pertumbuhan ekonomi<br>-Jumlah penduduk<br>-Pendapatan asli daerah (PAD)<br>-Upah minimum kabupaten/kota (UMK) | Hasil persamaan regresi data panel menggunakan <i>Fixed effect model</i> menunjukkan ketimpangan pembangunan di provinsi Banten berfluktuatif dari tahun 2016-2020. Secara parsial pertumbuhan ekonomi, Jumlah penduduk dan PAD berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan sementara IPM dan UMK tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Secara bersama-sama seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten tahun 2016-2020 Menurut uji determinasi, semua variabel independen dapat menjelaskan terhadap variabel ketimpangan pembangunan sebesar 99,98% |

| (1) | (2)  | (3)  | (4)  | (5)   |
|-----|--|--|--|---|
| 13. | Herwin Mopangga, 2011. <i>Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo</i> | Independen:<br>Indeks pembangunan manusia<br><br>Dependen:<br>-Ketimpangan pembangunan | Independen:<br>-PDRB perkapita<br>-Rasio belanja infrastruktur (RBI)<br><br>Dependen:<br>Pertumbuhan ekonomi | Secara simultan, perbedaan pada PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia dan rasio belanja infrastruktur sangat signifikan sebagai sumber utama ketimpangan di Provinsi Gorontalo. Pada model dengan menggunakan Indeks Williamson, PDRB per kapita signifikan serta IPM dan RBI sangat signifikan sebagai sumber ketimpangan di Provinsi Gorontalo. Dengan model yang menggunakan Indeks Gini, secara parsial hanya variabel PDRB per kapita yang tidak signifikan sebagai sumber ketimpangan pembangunan sementara variabel IPM dan RBI berpengaruh positif signifikan sebagai sumber ketimpangan di Provinsi Gorontalo. |
| 14. | Mario Andreas Kiton, 2019. <i>Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara</i>        | Independen:<br>Aglomerasi<br><br>Dependen:<br>Ketimpangan pembangunan                  | Independen:<br>-Investasi<br>-Angkatan kerja<br>-Dana perimbangan  | Hasil penelitian menunjukkan investasi dan angkatan kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pembangunan, variabel dana perimbangan berpengaruh positif tidak signifikan dan variabel aglomerasi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Dari hasil koefisien determinasi (R <sup>2</sup> ) menunjukkan bahwa variabel investasi, angkatan kerja, dana perimbangan dan aglomerasi yang diteliti benar mempengaruhi ketimpangan sebesar 87,15% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.  |

| (1) | (2)   | (3)                                  | (4)                               | (5)   |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 15. | Bukuri Dumani, 2020.<br><i>Regional Inequality of Economic and Social Developments in Albania</i> | Dependen:<br>Ketimpangan pembangunan | Independen:<br>Tingkat pendidikan | Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa banyak dari perkembangan ekonomi dan sosial di beberapa wilayah sekitar dua kali lebih rendah daripada di wilayah dengan kinerja terbaik di negara ini. Berfokus pada pendidikan, levelnya berjalan seiring dengan yang lain perkembangan di wilayah; Wilayah dengan indikator ekonomi yang lebih rendah juga memiliki partisipasi yang lebih rendah dalam pendidikan dan pencapaian pendidikan. |

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yaitu konsep untuk menentukan persepsi dan keterkaitan variabel yang akan diteliti dengan teori yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka. Mengacu pada teori yang ada maka garis besar penelitian ini yaitu melihat hubungan antara aglomerasi, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa Tahun 2015-2019 melalui proses analisis data sebagaimana dapat dilihat dari kerangka teori.

### 2.2.1 Hubungan Aglomerasi dengan Ketimpangan Pembangunan

Menurut teori Growth Poles (Perroux) kegiatan ekonomi suatu wilayah cenderung beraglomerasi di sekitar pusat-pusat pertumbuhan. Adanya pusat pertumbuhan di suatu wilayah dapat menimbulkan ketimpangan wilayah apabila pusat pertumbuhan tersebut tidak memberikan dampak terhadap wilayah lain di sekitarnya. Sehingga proses pertumbuhan dan pembangunan hanya terjadi pada wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan.

Berdasarkan uraian di atas, peningkatan aglomerasi justru akan menambah ketimpangan pembangunan antar wilayah karena pertumbuhan ekonomi hanya terjadi pada wilayah yang masuk ke dalam aglomerasi. Seperti yang telah dibuktikan oleh penelitian sebelumnya, Yusica (2018) menunjukkan hubungan positif antara aglomerasi dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah, dimana apabila aglomerasi meningkat maka nilai ketimpangan pembangunan akan meningkat pula.

### **2.2.2 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Ketimpangan Pembangunan**

Menurut teori Neo-klasik ketimpangan pembangunan wilayah salah satunya disebabkan oleh perbedaan kualitas sumber daya manusia, wilayah maju umumnya memanfaatkan kesempatan yang ada dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang baik. Sementara wilayah yang masih tertinggal tidak mampu memanfaatkan pembangunan yang ada karena rendahnya kualitas sumber daya manusia. Perbedaan ini yang akan menimbulkan ketimpangan pembangunan antar daerah. Kualitas sumber daya manusia di suatu daerah ditunjukkan oleh indeks pembangunan manusia.

Indeks pembangunan manusia memiliki beberapa dimensi. Pertama, yaitu dimensi pendidikan yang memiliki peranan penting untuk memperlancar pembangunan perekonomian yaitu dalam kecerdasan dan keterampilan masyarakat, sehingga akan berdampak pada penciptaan tenaga kerja yang efektif dan efisien. Kedua, yaitu dimensi kesehatan yang akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi dengan sumber daya manusia yang sehat akan mempermudah dalam

kelancaran melakukan aktivitas pekerjaan. Ketiga, dimensi standar hidup layak, tingkat pendapatan masyarakat akan meningkat yang kemudian akan berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan pembangunan antar wilayah.

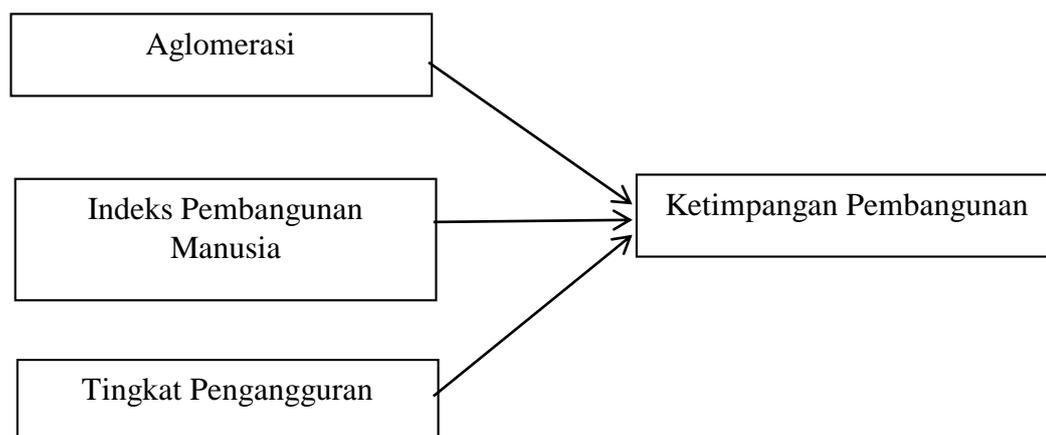
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang kemudian pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penurunan ketimpangan pembangunan. Hubungan negatif antara indeks pembangunan manusia dan ketimpangan pembangunan antar wilayah telah dibuktikan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurhuda (2013), menunjukkan apabila indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan maka akan menurunkan ketimpangan pembangunan.

### **2.2.3 Hubungan Tingkat Pengangguran dengan Ketimpangan Pembangunan**

Menurut Sjafrizal (2008) faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah salah satunya adalah karena perbedaan kondisi demografis. Demografis disini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, dan perbedaan kondisi ketenagakerjaan termasuk didalamnya adalah tingkat pengangguran. Wilayah dengan kondisi demografis yang tidak baik akan mempunyai produktivitas kerja yang lebih rendah sehingga akan menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi dibanding dengan wilayah lain yang mengakibatkan meningkatnya ketimpangan antar wilayah meningkat.

Lessman (2006) dalam Dhyatmika dan Atmanti (2013) melihat kondisi demografis dari sisi tingkat pengangguran suatu daerah, tingkat pengangguran yang tinggi akan menyebabkan semakin tingginya ketimpangan wilayah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfiansyah dan Budyanra (2019) menunjukkan hubungan positif antara tingkat pengangguran dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah, artinya apabila tingkat pengangguran menurun, maka nilai ketimpangan pembangunan akan menurun pula.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, bahwa aglomerasi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**

### **2.3 Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara sebuah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka penelitian di atas maka dapat dikemukakan suatu hipotesis yang akan diuji kebenarannya dalam penelitian, yaitu:

1. Diduga secara parsial aglomerasi dan tingkat pengangguran berpengaruh secara positif terhadap ketimpangan pembangunan, sedangkan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa tahun 2015-2019.
2. Diduga secara bersama-sama aglomerasi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa tahun 2015-2019.